



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00201977808, 25 Oktober 2019

Pencipta

Nama : **Mumtazinur, MA**
Alamat : **Jl. Miruek Taman Lr. Mesjid No. 24 Tanjung Selamat Darussalam
Aceh Besar, Aceh Besar, Di Aceh, 23373**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**
Alamat : **Jalan Syech Abdul Rauf, Kompleks UIN Ar-Raniry, Kopelma
Darussalam, Banda Aceh, Di Aceh, 23111**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
Judul Ciptaan : **Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya Dan
Upaya Diplomasi Kemanusiaan (Humanitarian Diplomacy)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **30 September 2019, di Banda Aceh**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000160501**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL



Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

No.Reg 19114000021031

LAPORAN PENELITIAN



BANTUAN KEMANUSIAAN ACEH BAGI PENGUNGSI ROHINGYA DAN UPAYA DIPLOMASI KEMANUSIAAN *(Humanitarian Diplomacy)*

Ketua Peneliti

Mumtazinur, MA

NIDN: 2009098601

ID Peneliti: 200909860109019

Anggota:

1. M.Fakhrul Mahdi
2. Siti Katsummi Mara

Kategori Penelitian	Pembinaan/ Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Sosial Politik
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2019**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2019**

1. a. Judul Penelitian : Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)
 - b. Kategori Penelitian : Penelitian Pembinaan/ Kapasitas
 - c. No. Registrasi : 19114000021031
 - d. Bidang Ilmu yang diteliti : Sosial Politik

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Mumtazinur, MA
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP(*Kosongkan bagi Non PNS*) : 198609092014032002
 - d. NIDN : 2009098601
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200909860109019
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk.I/III(b)
 - g. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : M.Fakhrul Mahdi
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

 - j. Anggota Peneliti 2 (*Jika Ada*)
 - Nama Lengkap : Siti Katsummi Mara
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Fakultas/Prodi : Tarbiyah/ Pendidikan Bahasa Inggris

3. Lokasi Penelitian :
4. Jangka Waktu Penelitian : 6 (enam) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2019
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 15.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2019
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Dto,

Banda Aceh, 30 Oktober 2018
Peneliti,
Dto,

Dr. Muhammad Maulana, M. Ag.
NIP. 197204261997031002

Mumtazinur, MA
NIDN. 198609092014032002

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
Dto,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya
Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)

Ketua Peneliti:

Mumtazinur, MA

Anggota Peneliti:

M. Fakhru Mahdi; Siti Katsummi Mara

Abstrak

Tulisan ini beranjak dari krisis kemanusiaan yang melanda Rakhine Myanmar yang berimbas pada munculnya arus pengungsi eksternal menuju berbagai negara termasuk Indonesia. Bantuan Kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh menjadi penting mengingat banyak negara yang menolak kehadiran pengungsi Rohingya ini. Selain itu tulisan ini mencoba mengulas bantuan kemanusiaan Aceh bagi Pengungsi Rohingya serta korelasinya bagi upaya diplomasi kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*) Pemerintah Indonesia. Tulisan ini juga memaparkan latar belakang bantuan kemanusiaan yang diberikan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya serta bentuk-bentuk bantuan yang diberikan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Peran masyarakat Aceh yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi kepemimpinan Indonesia ditingkat kawasan dan global sebagai pendukung perdamaian dunia. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai *peace supporter* yang siap menyokong kebijakan politik luar negeri Indonesia dan yang mengedepankan diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.

Kata Kunci: *Diplomasi Kemanusiaan, Rohingya, Bantuan Kemanusiaan, Politik Luar Negeri Indonesia*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sebagai pemberi dana bantuan penelitian tahun 2019 dengan nomor 395/PPK-UIN/V/2019 yang bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun Anggaran 2019.
2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; Bapak Prof. Dr. Warul Walidin, AK,MA
3. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Dr.Mukhlisah M.Ag
4. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh; Bapak Dr. Muhammad Maulana,M.Ag
5. Kepala Divisi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bireuen Ibu Maulida Ulfa R.

6. Keuchik Gampong Buket Teukeuh Bireuen, Bpk. Ismail Ahmad
 7. Tim Siaga Bencana Dinas Sosial Kabupaten Bireuen
 8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum
 9. Mahasiswa yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini
- Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 28 Oktober 2019

Ketua Peneliti,

Mumtazinur,MA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kontribusi Penelitian	5
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Kajian Teori	7
B. Kajian Pustaka	12
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	16
B. Metode Pengumpulan Data	17
C. Teknik Pengumpulan Data	18
D. Instrumen Pengumpulan Data	18
E. Metode Analisis Data	19
F. Sistematika Pembahasan	19
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Pengungsi Rohingya dan Konflik di Rakhine serta Kehadirannya di Aceh...	21
B. Latar Belakang Bantuan Kemanusiaan	36
C. Bentuk Bantuan Kemanusiaan Aceh Bagi Pengungsi Rohingya.....	42
D. Pengaruh Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan Indonesia	49

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kronologi Kekerasan Terhadap Rohingya di Rakhine	26
Tabel 2 Upaya Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Bagi pengungsi Rohingya	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
Peta Kekerasan di Myanmar	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun terakhir dunia internasional dikejutkan dengan konflik yang terjadi di Myanmar yang melibatkan sejumlah kelompok Budha Rakhine dan muslim Rohingya. Kelompok Rohingya sendiri adalah warga "pribumi" (*native*) Arakan, dan karena itu mereka sering disebut "Muslim Arakan" atau "India Arakan". Tetapi eksistensi Rohingya ditolak di Myanmar sehingga menyebabkan mereka menjadi salah satu kelompok etnis yang tidak memiliki negara sama seperti etnik Kurdi atau Berber di Timur Tengah.¹

Kerusuhan yang mulai terjadi sejak tahun 2012 semakin lama semakin memburuk. Bahkan Pemerintah Myanmar membentuk status darurat militer bagi daerah Rakhine dan mengizinkan dilakukannya intervensi militer. Kondisi ini tidak lantas menjadi solusi bagi pemulihan konflik ini malah semakin mempertajam dan memperburuk hubungan kedua kelompok yang notabene berbeda agama.

Tragedi kekerasan ini menyebabkan muslim Rohingya menjadi korban. Banyak yang tewas, rumah dan desa mereka dibakar, dan ratusan ribu muslim Rohingya menjadi pengungsi dan memilih untuk meninggalkan negara mereka. Banyak dari

¹ Sumanto Al-Qurtuby, *Sejarah Kelam Muslim Rohingya*. Diakses pada tanggal 14 September 2018 dari situs <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>

mereka yang memilih negara-negara tetangga terdekat mereka seperti Thailand, Bangladesh, Malaysia, maupun Indonesia sebagai tujuan mencari perlindungan.

Terlepas dari pemicu konflik yang masih menjadi perdebatan, namun tragedi kemanusiaan yang terjadi yang kemudian menyebabkan gelombang pengungsi ke berbagai negara cukup menyita perhatian dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan jumlah pengungsi Rohingya, yang terpaksa lari dari kampung halamannya di Rakhine, Myanmar, menuju Bangladesh kini sudah mencapai 589.000 orang. Jumlah ini diperkirakan akan segera mencapai 600 ribu pengungsi. Sekitar 60 persen dari mereka ialah anak-anak dan remaja. Jumlah ini meningkat dibanding data pada 17 Oktober 2017. Dan jumlah ini terus bertambah termasuk arus mengungsi yang menuju ke Indonesia yang kurang lebih berjumlah 12.000 orang.²

Dalam konteks keterkaitannya dengan kewajiban negara sebagai otoritas tertinggi maka perlu dijelaskan melalui konsep *Responsibility to Protect*. Dalam konsep *Responsibility to Protect* yang diusung Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) memberikan tanggung jawab kepada setiap negara untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya. Namun, ironisnya konsep ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh Myanmar yang dalam konteks ini yang dianggap oleh dunia internasional melakukan pembiaran terhadap praktik kekerasan yang terjadi.

² <http://aceh.tribunnews.com>, *Jumlah Pengungsi Rohingya di Indonesia Capai 11.941 Orang*, diakses pada tanggal 14 September dari situs <http://aceh.tribunnews.com/2015/05/19/jumlah-pengungsi-rohingya-di-indonesia-capai-11941-orang>

Sehingga arus pengungsi eksternal keberbagai negara pun tidak dapat dibendung lagi, salah satunya yang menjadi tujuan pengungsi yaitu Aceh, Indonesia.

Kurang lebih sejak dua tahun lalu, provinsi Aceh banyak menampung pengungsi muslim Rohingnya yang tanpa sengaja ditemukan terombang-ambing dilautan Aceh atau yang bahkan sudah merencanakan Aceh sebagai destinasi mereka. Masyarakat kemudian menyebutnya sebagai 'manusia perahu' karena perjalanan panjang dan menyedihkan mereka di lautan untuk mencari perlindungan dan bantuan dengan menggunakan perahu. Kondisi ini menyita perhatian nasional dan juga internasional mengingat konflik yang terjadi memaksa mereka untuk keluar dari negara dan mengharapkan uluran bantuan kemanusiaan negara tetangga. Masyarakat Aceh sendiri mencoba memberikan bantuan kemanusiaan dalam berbagai bentuk sebagai wujud aksi cepat tanggap.

Ada beberapa hal menarik yang penting untuk diteliti dalam masalah ini, yaitu diantara banyak negara yang menolak untuk menerima arus pengungsi Rohingnya, Indonesia menjadi negara yang cukup 'ramah' sebagai tuan rumah bagi para muslim Rohingnya. Salah satu alasan penolakan mereka yaitu karena merasa tidak ingin melakukan intervensi atas konflik yang terjadi sebagaimana prinsip yang dipegang teguh oleh anggota-anggota ASEAN. Namun, langkah yang diambil Indonesia dan masyarakat Aceh khususnya berbeda sehingga semakin menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian.

Jika kita telaah, maka banyak tulisan yang mengulas mengenai konflik kemanusiaan yang menimpa muslim Rohingya Myanmar. Beberapa menulis mengenai intervensi kemanusiaan yang diberikan dalam bentuk respons oleh negara-negara. Beberapa kajian lainnya banyak mengulas mengenai kemunculan konflik kemanusiaan di Rakhine itu sendiri sebagaimana yang akan penulis jabarkan pada bagian kajian pustaka.

Namun, sepengetahuan penulis belum menemukan ulasan yang secara spesifik mengangkat bantuan masyarakat Aceh dan hubungannya dengan upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan rekomendasi akan pentingnya peran masyarakat bagi komunitas dan relasi internasional. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terutama bagi para peminat kajian politik internasional dan kemanusiaan serta masyarakat secara luas.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi masyarakat Aceh dalam memberikan kontribusi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya?
2. Bagaimana bentuk kontribusi kemanusiaan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya?
3. Bagaimana pengaruh kontribusi masyarakat bagi upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat untuk mendapatkan keterangan secara komprehensif mengenai kontribusi masyarakat Aceh bagi upaya diplomasi kemanusiaan. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi masyarakat Aceh dalam memberikan kontribusi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.
2. Untuk mengetahui apa saja bentuk-bentuk kontribusi kemanusiaan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kontribusi masyarakat bagi upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia?

D. Kontribusi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah :

1. Dapat memberikan gambaran serta informasi latar belakang pemberian kontribusi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya oleh masyarakat Aceh.
2. Dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai sisi lain dari pemberian bantuan

kemanusiaan kepada pengungsi Rohingya terkait upaya pemerintah dalam menjalankan diplomasi kemanusiaan.

3. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam khazanah kajian politik terutama dalam konteks sosial politik internasional sebagai bagian dari bentuk kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Untuk menjawab perumusan masalah dan menarik suatu asumsi dasar yang berkaitan dengan masalah yang sudah ada maka penulis menggunakan teori yang relevan yang terkait dengan masalah yang dikemukakan yaitu dengan Konsep Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*) dan *Responsibility to Protect*.

Diplomasi Kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*)

Diplomasi kemanusiaan sebagai salah satu dimensi diplomasi memiliki karakter yang berbeda dibanding dengan diplomasi pada umumnya. Diplomasi kemanusiaan bertujuan untuk menyelamatkan umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, keyakinan politik, dan warga negara. Konsep kemanusiaan ini merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam menganalisis berbagai usaha yang berbeda yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan tujuan jangka pendek yang berbeda pula diberbagai belahan bumi.³

Dalam tulisan International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Diplomasi Kemanusiaan diartikan sebagai "*Humanitarian diplomacy is persuading decision makers and*

³ Ambarwati, "Diplomasi, Aspek, dan Aktor Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata," dalam Ambarwati, Denny R dan Rina Rusman (eds). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. (Jakarta: Rajawali), h.126.

*opinion leaders to act, at all times, in the interests of vulnerable people, and with full respect for fundamental humanitarian principles”*⁴. Hal senada juga disampaikan Larry Minear dalam tulisannya bahwa” *Humanitarian Diplomacy is Marked by an urgency that does not regard sovereignty with the deference of traditional diplomats”*⁵

Hal ini berarti diplomasi kemanusiaan (*Humanitarian Diplomacy*) adalah suatu tindakan bersama yang diharapkan dapat mendorong para pengambil kebijakan dalam konteks ini yaitu pemerintah yang berwenang untuk dapat mengambil tindakan dalam kerangka memberikan perlindungan pada prinsip-prinsip dasar kemanusiaan.

Bagi para pekerja kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan merupakan pekerjaan mereka sehari-hari ditengah situasi yang terkadang sangat berbahaya untuk menyelamatkan kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan. Tak dapat dipungkiri bahwa para pekerja kemanusiaan akan terlibat dengan negosiasi dengan aktor-aktor negara dan bukan negara dimana mereka itu hanya memiliki kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan yang sangat kecil.⁶

Organisasi antarpemerintah seperti Perserikatan Bangsa-bangsa (*United Nations*) merupakan gudangnya diplomasi kemanusiaan. Agen-agen perserikatan bangsa-bangsa sebagai organisasi antarpemerintah akan bekerja sama dengan pemerintah negara anggota dalam lingkup bidang tugas mereka.

⁴ Humanitarian Diplomacy Policy, diakses tanggal 12 September 2018 dari situs <https://media.ifrc.org/ifrc/>

⁵ Larry Minear dan Hazel Smith. *Humanitarian Diplomacy : Practitioner and their Craft*,(Tokyo:United Nations University,2007),h.10.

⁶ *Ibid*

Jika terjadi krisis internasional, semisal konflik bersenjata, agen-agen PBB memiliki sumber daya untuk membantu dan melindungi warga negara dalam skala besar dan sering bertindak sebagai koordinator aksi kemanusiaan.⁷

Disamping PBB, gerakan palang merah juga banyak bergerak di daerah konflik. Organisasi ini memiliki misi untuk melindungi dan membantuk korban bersenjata dan situasi gangguan dalam negeri, sipil maupun militer, secara netral tidak banyak memihak.⁸ Tugas yang dilakukannya bervariasi tergantung pada masalah yang dihadapi dan daerahnya, tetapi pada umumnya adalah membantu dan melindungi korban konflik serta melakukan aksi pencegahan dan diplomasi kemanusiaan.⁹

Seiring dengan berkembangnya situasi dan konflik yang terjadi dalam konteks global, maka konsep diplomasi kemanusiaan yang dilakukan pun tidak lagi terbatas pada peran aktor negara saja (*state actor*) tetapi juga melibatkan aktor non-negara (*non-state actor*). Diplomasi kemanusiaan saat ini banyak melibatkan aktor seperti organisasi non-pemerintah maupun individu atau masyarakat untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang memang menjadi prioritas utama kala konflik terjadi.

⁷ *Ibid*

⁸ ICRC, *Kenali ICRC*, (Jenewa, 2005), h.3

⁹ *Ibid*, hal.4

Konsep *Responsibility to Protect*

Konsep ini secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggung jawab melindungi hak-hak asasi manusia tanpa mengganggu atau menentang kedaulatan negara yang bersangkutan.¹⁰Oleh karena itu, konsep *responsibility to protect* sangat relevan untuk diterapkan serta mudah diterima oleh masyarakat internasional dibandingkan intervensi kemanusiaan. Dewan Keamanan PBB pun turut mendukung dan mengakui relevansi *responsibility to protect*.

Persatuan Bangsa-Bangsa juga telah menghasilkan rumusan prinsip-prinsip *responsibility to protect* ke dalam tiga prinsip utama. Pertama, prinsip bahwa negara-negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi warga negaranya dari genosida, kejahatan perang, penghapusan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, prinsip menyatakan komitmen komunitas internasional (anggota PBB) untuk membantu negara-negara dalam melindungi warga negaranya dari kejahatan kemanusiaan. Ketiga, prinsip atas tanggung jawab setiap warga negara anggota PBB untuk merespon atau mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah dan menghentikan kejahatan kemanusiaan ketika suatu negara gagal memberikan perlindungan kemanusiaan yang dimaksud.¹¹

¹⁰ Marelda, Santa. "Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab dalam Kedaulatan Negara". *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol 2. No.1 Tahun 2011, h.7

¹¹ *ibid*

Selain itu, Secara garis besar, *Responsibility to Protect* mencakup tiga tanggung jawab yang terdiri dari :¹²

1. Tanggung jawab untuk mencegah (*responsibility to prevent*), merupakan tanggung jawab untuk menyikapi akar penyebab dan penyebab-penyebab langsung dari konflik internal serta krisis yang disebabkan oleh perbuatan manusia, yang mengakibatkan resiko terhadap populasi.

2. Tanggung jawab untuk bereaksi (*responsibility to react*), merupakan tanggung jawab untuk meresponi situasi-situasi yang memaksa dilakukannya langkah-langkah yang tepat demi kepentingan kemanusiaan, yang dapat berupa upaya paksa seperti sanksi-sanksi dan penuntutan internasional, dan dalam kasus yang ekstrim dapat berupa intervensi militer.

3. Tanggung jawab untuk pemulihan (*responsibility to rebuild*), tanggung jawab pemulihan (*responsibility to rebuild*) merupakan tanggung jawab untuk memberikan bantuan dalam proses rekonstruksi dan rekonsiliasi yang dilakukan setelah intervensi militer.

Konsep *Responsibility to Protect* ini kemudian dianggap menjadi jalan keluar atas dilemma yang dialami terkait dengan prinsip kedaulatan negara dan intervensi kemanusiaan. Konsep ini menjadi jawaban atas tantangan global terkait konflik kemanusiaan yang kerap terjadi dan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan atas peristiwa yang terjadi. Konsep

¹² Report of ICSS (International Commission on Intervention and State Sovereignty), *Responsibility to Protect*, (Canada :International Development Research Centre,2001),h.17

ini lebih lanjut menjadi landasan bagi negara-negara maupun bagi warga negara untuk memberikan perlindungan bagi warganya maupun memberikan bantuan kemanusiaan.

B. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, ada beberapa literatur yang digunakan untuk membahas permasalahan yang terkait dengan potensi konflik maupun rawan kekerasan dalam pilkada untuk memperkuat argumen yang dibuat oleh penulis. Diharapkan tinjauan pustaka ini dapat memberikan masukan dalam melakukan penulisan dan memberikan kelengkapan pada data penelitian.

Jurnal pertama berjudul "*Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya*" karya Anifa Ludfiani, Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko yang diterbitkan pada jurnal *E-SOSPOL Volume IV Edisi 2, Mei - Agustus 2017*. Tulisan ini memaparkan mengenai konflik berkepanjangan yang menimpa masyarakat Rohingya di Myanmar. Penderitaan ini kemudian berlanjut menjadi krisis kemanusiaan dan membawa gelombang pengungsi menuju beberapa negara di Asia. Salah satunya yang menjadi sasaran arus pengungsi yaitu Thailand. Jumlah kedatangan pengungsi Rohingya yang terus menerus menjadi beban tersendiri bagi pemerintah Thailand terutama dalam hal ekonomi dan sosial. Adanya berbagai permasalahan yang dialami pemerintah Thailand tersebut akhirnya mendorong adanya inisiatif pemerintah Thailand untuk terlibat secara aktif dalam membantu mengatasi gelombang pengungsi Rohingya. Dalam upayanya mengatasi gelombang pengungsi Rohingya, terdapat

dua hal utama yang dilakukan oleh Thailand. Pertama, upaya penanganan terhadap pengungsi Rohingya yang ada di Thailand. Kedua, upaya membantu Myanmar dalam mencari langkah solutif guna menyelesaikan krisis kemanusiaan etnis Rohingya sebagaimana prinsip *responsibility to protect*.

Tulisan kedua karya Gonda Yumitro yang diterbitkan pada Jurnal Sospol, Vol 3 No 2 (Juli-Desember 2017) dengan judul "*Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya*". Tulisan ini menggambarkan bahwa respon Internasional terhadap isu Rohingya cukup massif baik pada level bilateral, regional, maupun Internasional. Namun demikian, berbagai upaya yang dilakukan belum bersifat sistematis untuk menyelesaikan akar persoalan. Beberapa respon yang muncul lebih terlihat sebagai upaya politik untuk pencitraan diri daripada langkah ril menyelesaikan masalah, misalnya dengan mendeportasi para pengungsi Rohingya yang sudah kehilangan kewarganegaraan mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah konkrit untuk menyelesaikan masalah baik pada level bilateral, regional, maupun Internasional belum begitu terlihat. Berbagai upaya yang dilakukan masih lebih banyak bersifat normatif, bahkan untuk kepentingan politik rejim tertentu. Hal ini di antaranya disebabkan karena prinsip non intervensi dan kurangnya power dalam menangani persoalan serta berbagai kepentingan tersembunyi. Oleh karena itu, *Responsibility to Protect* utamanya dalam penyelesaian masalah Rohingya hanya bisa dilakukan jika semua pihak mempunyai komitmen yang kuat untuk berpihak kepada nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan dengan

melakukan langkah konkret dalam menyelesaikan akar persoalan.

Tulisan berikutnya berjudul "*Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar*" karya Syarifatul Ula yang diterbitkan pada *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2017. Tulisan ini mengulas mengenai krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar yang terjadi pada tahun 2012 dan berujung pada saling bunuh antara kedua etnis Rakhine dan Rohingya. Tulisan ini juga berusaha memberikan pemahaman mengenai keterlibatan aktor non-negara dalam konteks ini. Lebih lanjut tulisan ini berusaha memberikan pemahaman terhadap peran aktor hubungan internasional khususnya NGO (*Non-Governmental Organization*) internasional. Human Rights Watch (HRW) sebagai salah satu INGO yang hirau dengan penegakan hak asasi manusia, hadir di Myanmar untuk membantu korban Rohingya pasca konflik yang melibatkan etnis Rohingya di Myanmar. Dalam melihat krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar sebagai aktor non-negara HRW hadir untuk membantu etnis Rohingya yang telah mengalami diskriminasi. Akhir tulisan disimpulkan bahwa sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang advokasi kemanusiaan, HRW telah mengupayakan perlindungan hak asasi manusia bagi etnis Rohingya. *Pertama*, aktor non-pemerintah tersebut telah dominan menggunakan strategi *information politics* dalam menempuh perjuangannya di Myanmar. *Kedua*, HRW belum mampu melakukan perubahan kondisi Myanmar atau mengubah kebijakan pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya. Hal ini

dikarenakan tidak adanya *leverage politics* serta *accountability politics* dalam perjuangannya.

Berdasarkan pengamatan penulis sampai saat ini, banyak tulisan yang mengulas mengenai diplomasi kemanusiaan maupun pengungsi Rohingya yang memang menjadi isu hangat beberapa tahun terakhir. Tetapi sampai saat ini belum ditemukan tulisan dengan objek spesifik mengenai masyarakat Aceh terutama bila dikaitkan dengan konteks diplomasi kemanusiaan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting untuk mencapai hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode dibutuhkan agar peneliti mempunyai prosedur keilmuan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. Penelitian kualitatif merupakan sebuah terma luas yang menekankan pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk menerjemahkan penelitian.¹³ Pendekatan ini berusaha memperoleh dan mengolah data yang diperoleh dengan ukuran dan tekanan pada nilai-nilai kualitasnya bukan pada nilai kuantitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta membuat gambaran secara sistematis dan akurat tentang topik yang akan diteliti. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan untuk menggambarkan suatu gejala atau fakta yang

¹³ Paul D. Leedy, *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall, inc, 1997, hal.155.

berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kontribusi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam melakukan praktik diplomasi kemanusiaan.

B. Metode Pengumpulan Data

Salah satu tahapan penting dalam proses penelitian adalah kegiatan untuk mengumpulkan data. Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*).

Penelitian Lapangan (*field research*)

Yaitu pengumpulan data primer untuk memperoleh data yang relevan, terpercaya dan valid. Dalam mengumpulkan data primer, peneliti melakukan penelitian terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mendatangi narasumber yang kompeten dalam bidangnya sesuai dengan kajian penulis.

Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Yaitu pengumpulan data sekunder yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dijadikan sumber data sekunder adalah buku-buku serta

¹⁴ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghafia Indonesia, 1998, hal 63.

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1998, hal .91.

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan konflik dan pelaksanaan pemilihan kepada daerah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada penyusunan penelitian ini, penulis memerlukan data yang sesuai dengan kajian penelitian yang penulis lakukan. Penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya yaitu:

Wawancara (*interview*)

Pengumpulan data dengan wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan melakukan wawancara langsung atau tanya jawab secara lisan kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan objek penelitian.

Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi yaitu cara mendapatkan data atau informasi dari dokumentasi yang menunjang proses penelitian seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan berbagai sumber penting lainnya.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Melalui teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan, maka masing-masing penelitian menggunakan yang berbeda-beda. Untuk teknik wawancara penulis menggunakan instrumen kertas dan alat tulis untuk mendapatkan data dari narasumber.

E. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh, selanjutnya maka peneliti akan melakukan pengolahan data dan menganalisis data tersebut dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi lainnya untuk pemahaman peneliti tentang kasus diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁶ Data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dikaji dengan teori yang diangkat dan kemudian dianalisis oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

Analisis data menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan situasi yang terjadi serta lebih lanjut menganalisis berdasarkan data-data yang diperoleh untuk mendapatkan sebuah hasil penelitian.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini, peneliti membagi pembahasannya dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta, 1999, hal.334.

Bab dua membahas mengenai studi kepustakaan dan kerangka teori yang memuat konsep Diplomasi kemanusiaan dan konsep *Responsibility to Protect*.

Bab tiga menguraikan mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, analisis data, serta sistematika pembahasan

Bab empat merupakan pembahasan yang terdiri dari kontribusi dan pengaruh kontribusi terhadap upaya diplomasi kemanusiaan.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Pada bab ini peneliti menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian ini dan juga saran-saran untuk kemajuan kedepan yang lebih baik lagi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pengungsi Rohingya dan konflik di Rakhine Serta kehadirannya di Aceh

Pengungsi Rohingya dan Konflik Rakhine

Kasus pengungsi Rohingya dalam beberapa tahun terakhir telah menyita perhatian dunia dan juga komunitas internasional. Myanmar sebagai Negara asal mereka menolak eksistensi mereka sebagai bagian dari penduduk asli atau pribumi, sehingga tidak berhak mendapatkan haknya sebagai warganegara yang sah. Bahkan kehadiran mereka oleh pemerintah dianggap sebagai ilegal atau 'haram'. Sehingga, kehadiran penduduk Rohingya menarik untuk diuraikan latarbelakang asal usul keberadaan mereka dinegara yang menolak saat ini.

Pada zaman kuno, Negara Bagian Rakhine dikenal dengan nama Rohang. Sementara, orang- orang yang menghuni negeri itu dipanggil dengan sebutan "Rooinga" atau "Rohingya". Dengan demikian, Rohingya adalah kelompok etnik yang muncul melalui peristiwa sejarah yang panjang. Mereka bukanlah kelompok masyarakat yang tiba-tiba muncul ketika Inggris menancapkan kekuasaannya di Arakan dan Burma antara 1824-1948.¹⁷

¹⁷ <https://www.republika.co.id>, *Melacak Asal Usul Etnis Rohingya*, diakses tanggal 05 Agustus 2019 dari situs

Berdasarkan hasil penelitian Francis Buchanan asal Skotlandia dalam laporannya “Asiatic Research 5” yang diterbitkan tahun 1799, menyebutkan bahwa Masyarakat Rooinga yang berarti masyarakat pribumi asli Arakan telah lama menetap di Arakan dan memeluk agama Islam atau pengikut Muhammad (Mohammedan).

Senada dengan hal diatas, sebuah sensus yang pernah dilakukan pemerintah kolonial Inggris di Burma pada 1826, 1872, 1911, dan 1941 juga menyebutkan, masyarakat Rohingya yang diidentifikasi sebagai Muslim Arakan adalah salah satu ras asli di Burma.¹⁸ Di samping itu, hasil kajian Universitas Oxford sepanjang 1935-1942 menyimpulkan, kebudayaan Rohingya sama tuanya dengan usia Monumen Batu Ananda Sandra yang didirikan di Arakan pada abad kedelapan silam.

Bila kita lihat catatan sejarah diatas, semua catatan di atas dapat menjadi gambaran bahwa etnik Muslim Rohingya memiliki akar sejarah yang kuat sebagai salah satu ras pribumi asli di Rakhine yang sekarang menjadi bagian dari wilayah Myanmar. Meskipun demikian, tetap saja Pemerintah Myanmar berkeras bahwa mereka adalah pendatang baru dari subkontinen India, sehingga konstitusi negara itu tidak memasukkan mereka dalam kelompok masyarakat adat yang berhak mendapat kewarganegaraan.

Berdasarkan sejarah, penduduk Rakhine mayoritas membenci bahkan menolak kehadiran Rohingya di negaranya

<https://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/05/31/np7roj-melacak-asal-usul-etnis-rohingya>

¹⁸ *Ibid*

yang secara nyata sangat berbeda secara keyakinan beragama dengan agama mayoritas yaitu Buddha. Disisi lain, masyarakat Rohingya merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi dari pemerintah dan penduduk Myanmar. Tinggal di salah satu negara bagian termiskin di Myanmar, dan gerakan dan akses mereka terhadap pekerjaan juga sangat dibatasi, menambah daftar panjang penderitaan penduduk Rohingya.

Lantas bagaimana sejarah konflik ini terjadi? Konflik yang diawali oleh Kerusuhan ini dipicu oleh sengketa sektarian antara kedua belah pihak. Penyebab utamanya masih belum jelas. Namun, banyak menyebut hal ini dimulai oleh kasus pemerkosaan dan pembunuhan seorang perempuan Rakhine yang diikuti oleh pembunuhan sepuluh Muslim Burma oleh orang Rakhine sebagai pemicunya. Pemerintah Myanmar menanggapi dengan menetapkan jam malam dan mengirim pasukan ke wilayah konflik.

Banyak yang menyebutkan bahwa konflik yang terjadi ini merupakan bentuk aksi saling balas antara Pemerintah Myanmar dan juga masyarakat Rohingya. Tidak jelas peristiwa apa sebenarnya yang menjadi pemicu atau "*trigger*" kekerasan kolektif Buddha-Muslim itu. Sebagian ada yang mengatakan tragedi itu dipicu oleh kasus pemerkosaan seorang perempuan (Buddha) Rakhine yang dilakukan beberapa orang Muslim Rohingya ("*gang rape*"). Ada lagi yang mengatakan tragedi itu

dipicu oleh pembunuhan atas sejumlah Muslim Rohingya (oleh massa Buddha Rakhine).¹⁹

Namun, apapun pemicunya, yang pasti kedua belah pihak terlibat dalam aksi saling bunuh yang kemudian berakhir pada tragedi kemanusiaan yang memilukan. Bahkan kini, kekerasan bukan hanya dilakukan oleh sekelompok Buddha Rakhine dan Muslim Rohingya saja tetapi sudah menjalar menjadi pertikaian Buddha-Muslim dari berbagai kelompok etnis. Sehingga dapat dikatakan Konflik Buddha-Muslim ini semakin menambah daftar panjang dan kompleksitas kekerasan di Myanmar.

Sebenarnya Muslim Rohingya juga bukan satu-satunya etnis yang menjadi korban kekerasan. Berbagai kelompok etnis, khususnya kelompok separatis etnis bersenjata, juga menjadi target kekerasan rezim pemerintah pusat dan militer. Rakhine juga bukan satu-satunya kawasan yang dilanda kekerasan sosial dan struktural. Shan dan Kachin, antara lain, adalah kawasan lain yang sangat rawan kekerasan karena memiliki sejarah separatisme etnis yang cukup panjang.²⁰

Dengan kata lain, ada banyak dimensi atau hal yang menyebabkan konflik terjadi di Myanmar yaitu masalah etnis, politik, ideologi, ekonomi, militer, dan lain sebagainya, dan tidak hanya seputar agama. Konflik berdimensi agama (Buddhisme-Islam), gerakan anti-Muslim Rohingya, atau

¹⁹ <https://www.dw.com>, Sejarah Klam Muslim Rohingya, diakses tanggal 06 Agustus 2019 dari situs <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>

²⁰ *Ibid*

kerusuhan antar-kelompok agama (Buddha-Muslim) hanyalah satu dari sekian daftar kekerasan di negara yang dulu bernama Burma ini.

Gambar 1
Peta Kekerasan di Myanmar



Sumber: <https://www.cnnindonesia.com>

Peta diatas merupakan gambaran singkat bagaimana konflik yang terjadi di Myanmar pada tahun 2017. Konflik yang terjadi membuat arus pengungsi yang cukup besar yang berupaya untuk melintasi perbatasan Bangladesh. Namun, meskipun begitu banyak juga sejumlah pengungsi yang terpaksa harus terjebak di antara daerah yang memisahkan kedua negara tersebut. Untuk mempermudah memahami konflik ini, berikut akan diuraikan secara singkat kronologi kekerasan rasial terhadap Kaum Rohingya dari sejak sebelum Kemerdekaan Myanmar sampai sekarang.²¹

Tabel 1
Kronologi Kekerasan Terhadap Rohingya di Myanmar

Tahun	Peristiwa	Keterangan
1942	Pembantaian Muslim Rohingya Pro-Inggris	Terjadi saat okupasi Jepang sebelum kemerdekaan Myanmar. Sekitar 100.000 Muslim Rohingya tewas dan ribuan desa hancur.
1948	Kemerdekaan Myanmar dari Inggris Raya	

²¹ <https://act.id/rohingya/>, Tentang Rohingya, diakses tanggal 22 Oktober 2019 dari situs <https://act.id/rohingya/>

1978	Operasi Dragon	King	Bertujuan untuk mengintimidasi kaum Rohingya dan memaksa mereka keluar dari wilayah Arakan. Sekitar 200.000 orang melarikan diri ke Bangladesh
1982	Myanmar tidak Mengakui Kewarganegaraan Kaum Rohingya		Rohingya tidak diakui sebagai bagian dari 135 kelompok etnis resmi Myanmar
1990an	Repatriasi		200.000 warga Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh di pulangkan paksa
2001	Penghancuran masjid dan sekolah		28 Mesjid dan sekolah islam di wilayah Maungdaw dihancurkan
2012	Muncul Gerakan Rohingya Elimination Group		Didalangi oleh kelompok ekstremis 969. Bertujuan untuk menghapus kaum Rohingya dari bumi Arakan. Sekitar 140.000 orang dipaksa tinggal di kamp konsentrasi dan 200 orang tewas.

2013	Eksodus besaran	Besar-	Ribuan warga Rohingya melarikan diri dengan kapal untuk mengungsi ke Indonesia, Malaysia dan Thailand
2015	Krisis Pengungsi di Laut Andaman	Kapal	Ribuan orang terkadung-katung di lautan. Diantara mereka banyak yang meninggal dalam perjalanan. UNHCR memperkirakan 150.000 orang melarikan diri dari perbatasan Myanmar-Bangladesh sejak Januari 2012.
2016	Pembantaian Muslim Rohingya		Per-Oktober , 150 orang dibunuh dan 3 desa hangus dibakar
2017	Operasi Pembersihan oleh Militer Myanmar	oleh	Per-September lebih dari 400 muslim Rohingya meninggal dunia, sedangkan ratusan ribu penduduk muslim Rohingya pergi melarikan diri.

Sumber: Laporan International State Crime Initiative (ISCI), 2015 dan A History of Arakan oleh Mohammed Yunus, 1994

Pengungsi, Imigran atau Pencari Suaka

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pengungsi Rohingya dan bantuan kemanusiaan, perlu diuraikan lebih detail mengenai penyebutan istilah pengungsi. Pengungsi, imigran dan pencari suaka merupakan istilah-istilah yang nyaris serupa dan kerap dipertukarkan dalam penggunaannya. Namun sejatinya ketiga istilah tersebut diatas dapat dibedakan sesuai dengan kondisi tertentu.

Menurut Konvensi PBB Tahun 1951 tentang Status Pengungsi, konvensi ini merumuskan pengungsi sebagai “orang yang memiliki rasa takut yang beralasan akan adanya penganiayaan yang berdasarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pandangan politik, yang berada di luar negara asalnya, dan tidak dapat atau karena rasa takutnya, tidak bersedia menerima perlindungan dari negaranya”

Konvensi ini dimulai dari setelah Perang Dunia II dimana konvensi tersebut mulanya diterapkan untuk mereka yang mengungsi di Eropa sebelum tahun 1951. Lalu pada tahun 1967, sebuah protokol untuk Konvensi ini telah menghapuskan pembatasan waktu dan tempat yang dirumuskan sebelumnya. **Namun, definisi tersebut** hanya berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap penganiayaan, organisasi-organisasi regional baik di Afrika (Persatuan Afrika 1969) maupun di Amerika Latin (Organisasi Negara-negara Amerika 1984) telah memperluas definisi tersebut yang mencakup pula pengungsian masal yang

terjadi sebagai akibat dari kehancuran sosial maupun ekonomi dalam konteks konflik.²²

Sedangkan pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

Dan merujuk pada konteks diatas, maka status tersebut diberikan oleh badan khusus pemerintah di negara yang ia singgahi atau badan PBB untuk pengungsi (UNHCR). Prosentase permohonan suaka yang diterima sangat beragam dari satu negara ke negara lain, bahkan untuk satu negara yang sama. Setelah menunggu proses selama bertahun-tahun, para pencari suaka yang mendapatkan jawaban negatif tidak dapat dipulangkan ke negara asalnya, yang membuat mereka terlantar. Para pencari suaka yang tidak meninggalkan negara yang disinggahinya biasanya dianggap sebagai imigran tanpa dokumen. Pencari suaka, terutama mereka yang permohonannya tidak diterima, semakin banyak yang ditampung di rumah detensi.²³

Sangat tidak memungkinkan bagi pencari suaka untuk meninggalkan negeri asal mereka tanpa membawa dokumen yang memadai dan visa. Maka, banyak pencari suaka terpaksa

²² <http://jrs.or.id/refugee/>, Pengungsi, diakses tanggal 25 Juli 2019 dari situs <http://jrs.or.id/refugee/>

²³ *Ibid*

memilih perjalanan yang mahal dan berbahaya untuk memasuki negara-negara secara tidak wajar di mana mereka dapat memperoleh status pengungsi.²⁴

Sedangkan Imigran dapat dijelaskan sebagai orang-orang yang melintasi batas-batas negara tanpa dokumen yang memadai (pasport, visa, dsb) disebut sebagai imigran tanpa dokumen (atau secara keliru disebut imigran gelap, karena masuk ke suatu negara secara tidak sah tidak selalu merupakan pelanggaran kriminal).²⁵

Meskipun imigran tanpa dokumen ini mungkin membutuhkan perlindungan internasional, seringkali mereka tidak mencari suaka. Meskipun sejumlah imigran tanpa dokumen tidak akan diakui sebagai pengungsi sesuai dengan ketentuan Konvensi Jenewa tahun 1951, tidak berarti bahwa mereka tidak membutuhkan perlindungan internasional. Banyak di antara mereka yang meninggalkan kemiskinan yang parah, konflik umum, kehancuran ekonomi dsb. Di negara penerima, mereka seringkali tidak mendapatkan akses terhadap pelayanan dasar – seperti kesejahteraan sosial, pendidikan dan perawatan kesehatan – dan tidak memiliki hak atas pekerjaan.²⁶

Satu kondisi lagi ada yang disebut sebagai Pengungsi Prima Facie . pengungsi ini berkaitan dengan kondisi dimana dalam menghadapi konflik dan pelanggaran hak asasi manusia secara masal, orang-orang seringkali meninggalkan negaranya secara masal. Dalam situasi ini, sangatlah tidak praktis dan tidak perlu

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

untuk mengkaji masing-masing permohonan suaka yang mereka ajukan. Orang-orang ini sudah terbukti dengan sendirinya untuk dapat disebut pengungsi. Contoh dari gerakan pengungsi semacam ini dapat ditemukan dalam diri orang-orang Sudan yang mengungsi ke Chad, orang-orang Chad yang mengungsi ke Republik Afrika Tengah, orang Somalia ke Kenya, orang Sri Lanka yang mengungsi ke India dsb. Dan dalam konteks ini dapatlah dikatakan bahwasannya Etnis Rohingya merupakan kelompok pengungsi.

Sejarah Singkat Kehadiran Pengungsi Rohingya di Aceh

Krisis di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya cukup menyita perhatian dunia beberapa tahun belakangan. Hal ini karena konflik internal yang terjadi di Myanmar tidak hanya berdampak lokal namun juga global. Konflik yang terjadi dibagian Rakhine ini telah menyebabkan arus pengungsi eksternal menuju beberapa negara terdekat dikawasan Asia salah satunya adalah Indonesia. Aceh yang merupakan bagian paling barat Indonesia menjadi salah satu tempat yang mendadak disinggahi arus pengungsi Rohingya ini.

Kronologis kehadiran pengungsi Rohingya di Aceh ini dimulai pada hari Jumat 20 April 2018, sebanyak 79 orang Etnis Rohingya ditemukan terdampar di Pantai Kuala Radja Kabupaten Bireun Provinsi Aceh. Sebanyak 79 Pengungsi

Rohingya tersebut terdiri dari 44 orang Laki-laki, 27 orang Perempuan dan 8 orang diantaranya adalah bayi dan balita.²⁷

Laporan awal menyebutkan bahwa kelompok Pengungsi Rohingya tersebut diselamatkan oleh sejumlah masyarakat saat mereka terdampar di Pantai Kuala Radja karena kehabisan bahan bakar. Berita kehadiran pengungsi ini kemudian sampai ke instansi dan pemerintah daerah setempat. Oleh pihak yang berwenang kemudian memindahkan pengungsi Rohingya ini menuju tempat penampungan sementara di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) di Cot Gapu Bireuen.

Menurut keterangan para pengungsi mereka sudah terombang ambing dilautan selama 2 minggu lamanya dengan menggunakan kapal kayu penangkap ikan yang berangkat dari Myanmar. Sebelum sampai di Aceh, mereka telah terlebih dulu sampai di Thailand namun ditolak, lalu mereka menuju Malaysia namun juga ditolak, sampai akhirnya mereka sampai di Perairan pantai Kuala Radja Aceh.

Setelah delapan hari berada dilautan, kapal kayu yang mereka tumpagi mulai kehabisan bahan bakar, dan saat itu mereka melihat kapal nelayan Aceh. Oleh para nelayan, kapal pengungsi Rohingya ini pun digiring ke tepi pantai untuk kemudian dievakuasi. Kondisi para pengungsi saat pertama kali ditemukan terdampar dalam kondisi yang sangat menyedihkan dan mengkhawatirkan. Nyaris seluruh pengungsi Rohingya tiba

²⁷ Hasil Wawancara dengan Maulida Ulfa R, Kepala Divisi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Juli 2019 Pkl.14.00 di Kantor Dinsos Bireuen.

dengan kondisi kesehatan yang sangat lemah karena kekurangan cairan dan makanan.

Sebelumnya, sekelompok pengungsi Rohingya juga ditemukan terombang ambing di ambing di perairan Kuala Idi Rayeuk, Aceh Timur oleh sejumlah nelayan Aceh. Kelima orang pengungsi Rohingya itu terdiri dari dua orang pria dewasa, dua wanita, dan seorang anak.²⁸ Kemudian para pengungsi eksternal ini pun mendapatkan penanganan dari instansi dan pemerintah setempat.

Bila melihat pada besarnya arus atau gelombang pengungsi Rohingya ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga di beberapa negara asia terdekat terutama ASEAN. Pada Agustus 2017, lebih dari 700 ribu orang Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh. Hal itu terjadi setelah militer Myanmar melakukan operasi brutal untuk menangkap gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Masifnya arus pengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh segera memicu krisis kemanusiaan. Para pengungsi Rohingya terpaksa harus tinggal di tenda atau kamp dan menggantungkan hidup pada bantuan internasional.²⁹

Pengungsi Rohingya yang berada di Bireuen Aceh merupakan bagian dari arus gelombang tersebut yang mengharapkan adanya bantuan internasional. Namun, beruntung kondisi ini dapat diantisipasi berkat dukungan dan

²⁸ <https://beritagar.id> , *Aceh Tampung Sementara Puluhan Pengungsi Rohingya*, diakses tanggal 23 Juli 2019 dari situs [www. Beritagar.id](http://www.Beritagar.id)

²⁹ <https://radartegal.com>, *Pengungsi Rohingya masih butuh bantuan*, diakses tanggal 23 Juli 2019 dari situs <https://radartegal.com/berita-nasional/pengungsi-rohingya-masih-butuh-bantuan.30158.html>

bantuan dari semua pihak yang berwenang di Aceh. Namun tak dapat dipungkiri terdapat banyak kendala yang dihadapi selama penanganan pengungsi Rohingya ini.

Adapun kendala yang dihadapi diawal kehadiran pengungsi Rohingya ini yaitu perbedaan bahasa, kondisi psikis pengungsi, perbedaan makananan yang dapat dikonsumsi, bantuan utama yang jumlahnya minim, terbatasnya obat-obatan, kondisi kesehatan para pengungsi yang rentan, dan berbagai kendala-kendala lainnya.³⁰

Perbedaan bahasa menjadi kendala yang cukup berarti selama proses penanganan muslim Rohingya ini mengingat mereka hanya berkomunikasi dengan bahasa mereka dan cukup minim yang mampu berbahasa Inggris. Sehingga membuat tim evakuasi harus menggunakan 'bahasa tubuh' untuk dapat berinteraksi dengan pengungsi Rohingya ini.

Kendala lain yang timbul yaitu kondisi psikologis para pengungsi yang tidak stabil. Hal ini dikarenakan berbagai hal tidak menyenangkan yang mereka alami selama konflik di negara mereka, disusul dengan upaya menyelamatkan diri dan bertahan hidup ditengah lautan sampai pada berada di negara lain yang asing bagi mereka. Trauma hingga guncangan batin atau psikologis menjadi faktor yang menyulitkan berkomunikasi disamping perbedaan bahasa yang tidak dapat ditangani.

³⁰ Hasil Wawancara dengan Maulida Ulfa R, Kepala Divisi Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Juli 2019 Pkl.14.00 di Kantor Dinsos Bireuen.

Disamping kedua hal diatas, kendala-kendala lain muncul seiring dengan keberadaan mereka ditempat pengungsian. Mulai dari keterbatasan obat-obatan yang memang sangat dibutuhkan, kebutuhan primer seperti pakaian dan makanan, sampai pada tanggungan kesehatan lain yang muncul karena minimnya sarana dan prasarana yang memadai dan layak.

B. Latar Belakang Bantuan Kemanusiaan Bagi Pengungsi Rohingya

Keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir telah menyita perhatian masyarakat didalam negeri dan juga dunia internasional. Perbincangan internasional yang mengemuka tidak hanya seputar ironisnya dan kecaman yang ditujukan kepada pemerintah Myanmar atas konflik kemanusiaan yang terjadi, namun juga terkait penanganan terhadap para pengungsi eksternal tersebut.

Konflik vertikal antar pemerintah dan warga sipil Myanmar ini tidak hanya disayangkan terjadi namun juga menuai kecaman dari berbagai komunitas masyarakat internasional. Hal ini beralasan mengingat seharusnya negara menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas keselamatan, kesejahteraan serta keamanan bagi setiap warga negaranya, namun yang terjadi malah sebaliknya.

Disisi lain isu yang turut mencuat yaitu bagaimana penanganan atas ribuan pengungsi yang mulai berdatangan ke berbagai negara tetangga untuk mencari suaka. Banyak negara

menolak dengan alasan pengungsi Rohingya bukanlah tanggung jawab mereka. Selain itu, masalah dana yang besar juga disinggung menjadi salah satu alasan penolakan. Tak dapat dielakkan bahwa bersedia menampung para pengungsi juga bermakna siap memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan disisi lain, tingkat kesejahteraan masyarakat di negara tersebut tidak kunjung meningkat atau bahkan cenderung stagnan.

Beranjak pada kondisi inilah disinyalir berbagai penolakan muncul kepada muslim Rohingya untuk diterima di beberapa negara. Sedikit menilik kebelakang, Malaysia menegaskan diri menolak kehadiran 'manusia perahu' ini dengan berbagai alasan yaitu jumlah mereka yang terlalu banyak dan juga posisi negara mereka yang terlalu dekat dengan Malaysia. Kondisi ini dianggap berbahaya bagi domestik negara mereka dan secara internasional. Berbeda dengan saat mereka menerima pengungsi Bosnia pada tahun 2009 yang bersedia menampung mereka sebagai pengungsi atau penduduk tetap.³¹Selain itu tidak adanya faktor kedekatan secara etnis,ras, atau budaya juga dipandang sebagai salah satu faktor penolakan.

Senada dengan sikap Malaysia yang menolak menerima kedatangan pengungsi Rohingya, Thailand juga menunjukkan respons yang sama. Bahkan dengan tegas Thailand menunjukkan sikap melalui Perdana Menterinya yang menyatakan bahwa mereka menolak kehadiran pengungsi Rohingya di negara

³¹ <https://dunia.tempo.co>, *Alasan Malaysia Ogah Bantu Pengungsi Rohingya*, diakses tanggal 24 Juli 2019 dari situs <https://dunia.tempo.co/read/666972/alasan-malaysia-ogah-bantu-pengungsi-rohingya/full&view=ok>

mereka. Faktor ketiadaan dana menjadi alasan utama penolakan tersebut.³²

Senada dengan dua negara tetangga, Indonesia juga mengambil posisi tegas terkait arus masuk imigran Rohingya menuju perairan Indonesia. Sejak tahun 2015 saat kapal mereka mulai berniat menepi di perairan Indonesia, dengan tegas ditolak oleh Indonesia. Bantuan akan tetap diberikan tapi kapal tetap berada ditengah lautan dan tidak diizinkan bahkan untuk menepi diperairan Indonesia. Tindakan ini diambil sebagai bentuk awas atas ancaman terhadap pertahanan NKRI yang dapat berasal dari masuknya orang asing.

Sebenarnya penolakan Indonesia atas kehadiran pengungsi Rohingya salah satunya dipengaruhi oleh posisi Indonesia yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi Wina 1951. Hal ini berimbas ketidakmampuan Indonesia dalam menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka sebagaimana tuntutan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi.

Salah satu kendala yang menyebabkan Indonesia belum meratifikasi kedua protokol diatas yaitu karena jumlah penduduk Indonesia yang total 250 juta jiwa, dan 14 persennya berada di bawah garis kemiskinan. Persyaratan tersebut ditentukan oleh Lembaga PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR). Sehingga dapat dipahami bahwa kedatangan imigran Myanmar di Indonesia secara tidak langsung akan

³² <https://www.liputan6.com>, *Thailand-Malaysia Menolak, Pengungsi Rohingya terdampar di Aceh*, diakses tanggal 24 Juli 2019 dari situs <https://www.liputan6.com/global/read/2232748/thailand-malaysia-menolak-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh?>

menambah 'beban' pemerintah sehingga disisi lain warga negara Indonesia sendiri masih belum terbebas dari jerat kemiskinan.

Namun, hal yang menarik dalam kasus ini adalah disaat pemerintah Indonesia dengan tegas menentukan sikap penolakan terhadap pengungsi Rohingya, masyarakat Aceh 'menerima' kedatangan mereka saat terdampar diperairan laut Aceh. Tindakan ini sangat kontradiksi dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada beberapa kapal pengungsi Rohingya yang sempat ditemukan terombang ambing dilepas pantai pesisir Indonesia.

Adapun yang menjadi latar belakang utama masyarakat Aceh 'bersedia' memberikan tempat penampungan sementara dan juga bantuan adalah karena alasan atau faktor kemanusiaan (*humanity*).³³ Memang terkesan sangat klise sekali bila melihat pada faktor ini. Tapi tak dapat dinafikan, bahwa kondisi menyedihkan yang dialami para muslim Rohingya menyentuh sisi kemanusiaan setiap individu.

Bila dihubungkan ada satu faktor lain yang menguatkan alasan masyarakat Aceh mau memberikan bantuan dengan tangan terbuka kepada pengungsi Rohingya yaitu adanya persamaan nasib. Aceh yang merupakan daerah konflik paham benar bagaimana hidup dalam situasi yang tidak aman, penuh tekanan, berpotensi kekerasan, dan lain sebagainya. Berada dalam kurun waktu yang cukup lama dalam suasana konflik membuat masyarakat Aceh mempunyai 'sensitifitas' yang cukup

³³ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampiong Buket Teukeuh Bireuen, Bpk. Ismail Ahmadi di Gampiong Buket Teukeuh tanggal 23 Juli 2019 Pkl.15.00 WIB

tinggi terhadap konflik. Termasuk didalamnya rasa empati yang besar bagi mereka yang juga berada dalam situasi konflik dan instabilitas.

Maka tak mengherankan bila kita melihat antusiasme yang cukup besar terutama dari seluruh lapisan masyarakat di Aceh ketika mengetahui bahwa ada sekelompok besar pengungsi yang 'mampir' di wilayahnya. Kondisi ini kemudian menggugah sisi kemanusiaan masyarakat Aceh untuk memberikan bantuan, yang oleh masyarakat diluar Aceh dipandang sebagai bentuk bantuan kemanusiaan yang luar biasa. Mengingat negara-negara tetangga terdekat sudah mengambil sikap tegas menolak kehadiran pengungsi Rohingya ini.

Namun, bila kita lihat kembali beberapa tahun yang lalu tepatnya pada tahun 2004 saat Tsunami menghantam bumi Aceh, kondisi yang sama kurang lebih dirasakan oleh masyarakat Aceh secara umum. Kondisi Aceh pada waktu itu sangat memprihatinkan. Masyarakat kekurangan makanan, air bersih, tempat tinggal, sumber listrik, dan lain sebagainya. Namun, beruntung banyak sekali bantuan yang datang baik dari dalam dan luar negeri. Mengingat peristiwa ini menjadi berita besar dunia internasional pada waktu itu.

Jadi bila dihubungkan dengan bantuan yang diberikan oleh masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya juga tak terlepas dari ingatan masyarakat Aceh saat mendapatkan bantuan kemanusiaan dari negara lain. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa masyarakat Aceh paham betul apa yang dirasakan oleh pengungsi Rohingya saat mereka berada dalam

ketertindasan akibat konflik dinegaranya, ditambah lagi dengan harus bertahan hidup terombang-ambing ditengah lautan.

Sehingga dapat diuraikan kembali, meskipun terdengar klise namun salah satu alasan yang melatarbelakangi masyarakat Aceh bersedia memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya adalah faktor kemanusiaan. Bantuan yang diberikan masyarakat Aceh dapat juga kita artikan sebagai bentuk 'balas budi' atas apa yang dunia dan komunitas internasional berikan kepada masyarakat Aceh ketika Tsunami melanda dulu.

Faktor lain yang ikut mempengaruhi latar belakang pemberian bantuan ini adalah karena faktor keagamaan. Sebagaimana diketahui bersama bahwasannya pengungsi Rohingya beragama Islam. Sedangkan mayoritas penduduk Myanmar adalah beragama Buddha, hingga disinyalir salah satu faktor terjadinya konflik vertikal ini adalah adanya diskriminasi pemerintah kepada Etnis Rohingya. Sehingga banyak pihak yang menduga bahwa konflik yang terjadi disana berlatar belakang juga karena faktor agama.

Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Karena persamaan agama dengan pengungsi Rohingya maka masyarakat Aceh menganggap mereka adalah saudara seiman. Faktor inilah yang kemudian turut menguatkan serta menyakitkan bahwa pertolongan harus diberikan kepada mereka. Artinya masyarakat meyakinkan diri bahwa jika bukan sesama muslim

yang menolong saudaranya maka siapa lagi yang akan melakukannya.³⁴

Berdasarkan pada alasan-alasan diatas dapat kita lihat bahwa masyarakat Aceh memberikan bantuan kemanusiaan karena dorongan rasa kemanusiaan dan juga rasa persaudaraan sesama umat Islam. Tentunya urusan politik atau kebijakan luar negeri Indonesia tidak menjadi landasan dari tindakan yang diambil masyarakat Aceh. Bahkan boleh dikatakan bahwa bantuan kemanusiaan dari masyarakat tidak bersifat politis, karena masyarakat sangat awam mengenai apa yang menjadi kebijakan eksternal Indonesia terkait pengungsi Rohingya.

Hal ini beralasan mengingat bahwa nelayan Aceh 'menggiring' kapal pengungsi Rohingya agar menepi ke pinggir pantai agar bantuan dapat diberikan. Berbeda dengan sikap negara lain yang kita lihat bahkan 'mengusir' kapal ketika hendak menepi, atau bahkan memberikan bantuan ditengah lautan tapi mendapatkan izin untuk menuju pinggir pantai. Ketika para nelayan mengambil sikap tentunya tidak memikirkan mengenai urusan politik atau kebijakan luar negeri.

C. Bentuk Bantuan Kemanusiaan Masyarakat Aceh Bagi Pengungsi Rohingya

Tak dapat dipungkiri arus gelombang pengungsi Etnis Rohingya ini telah menyita perhatian dunia internasional.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Keuchik Gampiong Buket Teukeuh Bireuen, Bpk. Ismail Ahmadi di Gampiong Buket Teukeuh tanggal 23 Juli 2019 Pkl.15.00 WIB

Meskipun konflik ini telah terjadi dalam waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2012, namun, sampai saat ini belum membuahkan hasil yang cukup signifikan terutama bagi nasib pengungsi Rohingya sendiri. Bahkan dapat dikatakan respons masyarakat internasional dan pemerintah cenderung minim dan lamban. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya arus pengungsi Rohingya yang keluar dari negaranya untuk mencari perlindungan.

Beberapa negara sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya telah menyatakan diri menolak memberikan bantuan atau bahkan terlibat lebih jauh pada konflik vertikal ini. Malaysia dan Thailand sudah tegas mengambil sikap penolakan. Bangladesh dengan alasan yang cukup dapat dimengerti menyatakan menolak mengingat mereka pun terhimpit dengan kondisi negara sendiri yang masih berada pada status negara miskin.

Sedang bila melihat pada organisasi regional ASEAN (*Association of south east asian nation*) tempat Myanmar dan negara-negara lain bergabung juga belum menunjukkan kontribusi yang berarti. Meskipun negara-negara anggota telah menyuarakan hal yang sama, namun Myanmar menolak isu yang terjadi dinegaranya diangkat menjadi *high level dialogue* pada tingkat organisasi regional.

Alhasil, perbaikan nasib hidup pengungsi Rohingya belum menunjukkan titik cerah. Hal ini dipengaruhi juga oleh prinsip *non-intervention* yang dianut oleh ASEAN. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa ASEAN terbentuk dengan berpegang pada beberapa prinsip salah satunya adalah prinsip tidak ikut

campur urusan domestik negara lain (*non-intervention*). Prinsip inilah yang sedikit banyak telah menahan negara-negara anggota untuk terlibat pada urusan yang dianggap sebagai ranah domestik. Meskipun pada banyak kasus, urusan tersebut bersinggungan dengan isu yang bersifat sensitif seperti hak asasi manusia, konflik, dan lain sebagainya.

Beberapa Negara diluar ASEAN menunjukkan sikap mereka terkait arus pengungsi Rohingya ini dengan melayangkan kecaman kepada pemerintah Myanmar. Aung Sang Su Kyi yang dianggap sebagai tokoh penting kemanusiaan yang juga pernah mendapatkan nobel perdamaian tidak luput dari kecaman internasional karena dianggap acuh pada isu kemanusiaan ini. Padahal sejatinya nilai kemanusiaan menjadi hal yang paling urgensi dalam sebuah Negara berdaulat.

Berbeda dengan Negara tetangga, Indonesia punya respon yang berbeda. Meskipun beberapa tindakan yang diambil tidak mewakili pemerintah dalam konteks kebijakan. seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Aceh ketika memberikan bantuan. beberapa pihak punya cara tersendiri dalam merespon arus pengungsi Rohingya ini, begitupun masyarakat Aceh.

Masyarakat Aceh turut memberikan bantuan kemanusiaan yang dapat dikategorikan kedalam bantuan yang bersifat materil dan juga immaterial. Beberapa dinas terkait juga turut aktif membantu sebut saja Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bireuen, serta Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), Palang Merah Indonesia (PMI), dan Front Pembela Islam (FPI) setempat. Namun, bantuan ini sebenarnya tidak hanya berasal dari masyarakat Aceh saja , tapi

juga dari pemerintah setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat bahkan juga berasal dari luar Provinsi Aceh.

Bantuan Materiil

Materiil dapat diartikan sebagai hal yang bersifat kebendaan yang berupa uang, tempat tinggal, makanan, pakaian dan lain sebagainya. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya yaitu bantuan materiil. Barang yang diberikan meliputi pakaian, makanan sehari-hari, kebutuhan dasar sehari-hari, tempat tinggal sementara, dan lainnya.

Bantuan yang diberikan tidak hanya berasal dari masyarakat sekitar tempat penampungan dan juga pemerintah daerah setempat namun juga berasal dari masyarakat dan donatur dari luar daerah Aceh. Hal ini dipengaruhi juga oleh media massa yang mengabarkan mengenai keberadaan pengungsi Rohingya di Aceh beserta kondisi mereka yang memang sangat memprihatinkan. Kondisi ini lantas mendorong banyak pihak untuk turut membantu meringankan beban mereka.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa salah satu fasilitas yang diberikan kepada mereka sebagai bagian dari bantuan itu adalah tempat tinggal sementara. Gedung SKB yang berlokasi di Desa Cot Gapu Kabupaten Bireun merupakan bangunan sekolah yang diperuntukkan pertama kali kepada pengungsi Rohingya yang sedang tidak digunakan untuk kegiatan.

Kebutuhan makanan sehari-hari yang diterima oleh pengungsi Rohingya berasal dari berbagai sumber yaitu dari masyarakat sekitar, dinas sosial, kelompok sosial, atau bahkan relawan yang berasal dari dan luar Aceh. Masyarakat juga berinisiatif untuk membuat dapur umum agar dapat menunjang kebutuhan pangan dengan efektif dan efisien. Namun, tidak sedikit juga masyarakat diluar daerah turut membantu seperti memberikan beras dan bahan makanan lainnya. Namun, ada kendala yang dihadapi pada awal yaitu susahnya bagi para pengungsi Rohingya untuk menyesuaikan makanan ditempat pengungsian yang berbeda dari cita rasa para pengungsi. Tapi, perlahan mereka mulai dapat menerima dan sudah dapat menyesuaikan diri dengan begitu banyak perbedaan seperti makanan.

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa bantuan pangan tidak hanya berasal dari masyarakat setempat namun juga dari berbagai lembaga kemanusiaan seperti ACT (Aksi Cepat Tanggap) Indonesia. ACT Aceh dalam konteks ini berinisiatif untuk memberikan bantuan berupa layanan makanan siap santap. Kegiatan ini juga bekerja sama dengan pihak Taruna Siaga Bencana yang berada dalam Dinas Sosial Aceh dan juga segenap unsur pendukung lainnya.

Aksi ini mendapatkan apresiasi yang cukup besar mengingat pihak pengelola pengungsi Rohingya dan Pemerintah Kabupaten Bireun sudah mulai kesulitan dalam menyediakan logistik dikarenakan anggaran yang semakin menipis. Sehingga bantuan makanan siap santap dari ACT yang

ditargetkan sebanyak 250 paket setiap hari selama sebulan penuh dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengungsi.³⁵

Bantuan Moril

Bantuan lain yang diperoleh pengungsi Rohingya di Aceh selain bantuan materiil yaitu bantuan moril. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moril berarti mengenai moral. Bantuan moril didefinisikan sebagai bantuan yang berupa sokongan batin yang bukan berupa uang atau benda. Merujuk pada definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pengungsi Rohingya juga memperoleh bantuan yang tidak bersifat finansial namun cukup signifikan.

Menurut penuturan narasumber yaitu *Geuchik* setempat, kepedulian yang cukup besar dari masyarakat dan berbagai pihak telah membuat pengungsi Rohingya mendapatkan begitu banyak bantuan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bagi masyarakat atau personal yang mampu membantu secara finansial mereka akan mendonasikan uang mereka, sedangkan bagi yang merasa tidak cukup secara materil memilih memberikan bantuan moril saja.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa kisah dan perjalanan panjang yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya dalam memperjuangkan hidupnya cukup menguras air mata dan menggugah hati nurani. Bentuk kekerasan yang telah

³⁵ www.republika.co.id, *ACT Aceh Berikan Layanan Siap Santap ke Pengungsi Rohingya*, diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari situs www.republika.co.id

mereka alami baik secara fisik maupun verbal selama berada di negara asal sampai dengan di lokasi pengungsian telah menimbulkan luka mendalam bahkan bagi beberapa orang menjadi depresi dan trauma terutama bagi anak-anak.

Selama berada di lokasi pengungsi, banyak pengungsi Rohingya yang tidak membangun komunikasi yang intens dengan warga setempat. Hal ini selain dikarenakan keterbatasan bahasa yang mayoritas juga tidak menguasai bahasa Inggris, disisi lain karena masih berada dalam trauma akibat perjalanan yang begitu panjang dan dramatis. Pihak-pihak yang melihat ini sebagai bagian dari efek trauma berkepanjangan mencoba berkontribusi dengan memberikan bantuan moril sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Contohnya saja, beberapa pemuka agama setempat yang melihat kondisi ini berinisiatif mengumpulkan anak-anak pengungsi Rohingya untuk diberikan pendidikan agama terutama mengaji dan beribadah. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, melainkan dilihat sebagai upaya paling efektif untuk menyemangati kembali anak-anak tersebut pascatrauma. Mereka menilai bahwasannya cara yang paling baik dengan jalan mendekati kembali mereka pada nilai-nilai religius sebagaimana juga tuntunan dalam agama Islam.

Bantuan moril yang diperoleh oleh pengungsi Rohingya di Kabupaten Bireuen tidak hanya diperoleh dari penduduk setempat namun juga banyak berasal dari organisasi sosial kemanusiaan sebut saja Dompethduafa dan Aksi Cepat Tanggap Aceh. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Aksi Cepat

Tanggap Aceh yaitu membangun pengungsian bagi warga Rohingya yang berlokasi di Blang Adoe, Aceh Utara.

D. Pengaruh Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Diplomasi Kemanusiaan Indonesia

Diplomasi dapat diartikan sebagai proses politik yang dengannya entitas politik pada umumnya negara, mengadakan dan memelihara atau mempertahankan hubungan-hubungan resmi, langsung maupun tidak langsung satu sama lain dalam rangka mengejar tujuan, maksud, dan kepentingan mereka masing-masing, dan kebijakan-kebijakan prosedural atau hakiki dalam lingkungan internasional.³⁶

Diplomasi memiliki berbagai bentuk salah satunya adalah diplomasi kemanusiaan. Istilah ini menjadi sangat relevan saat membicarakan situasi yang berkenaan dengan kemanusiaan. Memberikan bantuan kemanusiaan kepada pihak yang membutuhkan dalam situasi genting dapat dikategorikan sebagai bagian dari diplomasi kemanusiaan.

Diplomasi kemanusiaan sebagai salah satu dimensi diplomasi memiliki karakter yang berbeda dari diplomasi pada umumnya. Diplomasi kemanusiaan ini ditujukan untuk

³⁶ Ambarwati, "Diplomasi, Aspek, dan Aktor Kemanusiaan dalam Konflik Bersenjata," dalam Ambarwati, Denny R dan Rina Rusman (eds). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. (Jakarta: Rajawali), h.126

menyelamatkan umat manusia tanpa memandang ras, suku, agama, gender, keyakinan politik maupun warga negara. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa diplomasi kemanusiaan adalah upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan kehidupan manusia tanpa melihat pada latar belakang atau faktor-faktor tertentu.³⁷

Konsep diplomasi kemanusiaan ini merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam menganalisis berbagai usaha yang berbeda yang dilakukan oleh berbagai aktor dengan tujuan jangka pendek yang berbeda pula diberbagai belahan bumi. Bagi para pekerja kemanusiaan, diplomasi kemanusiaan merupakan pekerjaan mereka sehari-hari ditengah situasi yang terkadang sangat berbgaya untuk menyelamatkan kehidupan orang yang membutuhkan pertolongan. Tak dapat dipungkiri bahwa para pekerja kemanusiaan akan terlibat dengan negosiasi dengan aktor-aktor negara dan bukan negara dimana mereka itu hanya memiliki kesamaan kepentingan, nilai, dan tujuan yang sangat kecil.³⁸

Saat ini dengan semakin berkembangnya situasi dan pola hubungan internasional, maka diplomasi kemanusiaan tidak hanya dilakukan oleh aktor negara (*state actor*) semata namun juga melibatkan aktor non-negara (*non-state actor*). Mereka dapat berasal dari organisasi-organisasi non pemerintah maupun individu. Dapat kita lihat bahwa diplomasi kemanusiaan melibatkan banyak pihak baik dari mapun luar pemerintahan

³⁷.*Ibid*

³⁸ *Ibid*

yang diperuntukkan untuk menciptakan kehidupan manusia yang lebih bermartabat.

Dalam ilmu hubungan internasional, konsep antara kemanusiaan dan diplomasi adalah dua hal yang berbeda. Bahkan acap kali keduanya saling berbenturan. Hal ini didasari atas dasar kepentingan negara (*national interest*) dan kepentingan dunia internasional secara umum. Hal ini bisa dipahami mengingat tidak semua kepentingan negara selalu berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat internasional.

Sehingga, kehadiran diplomasi kemanusiaan (*humanitarian diplomacy*) sebenarnya lahir sebagai jawaban atau solusi atas paradoks tersebut. Terlebih lagi jika hal tersebut bersinggungan dengan isu kemanusiaan yang diakibatkan oleh adanya konflik. Karena keberadaan diplomasi kemanusiaan berusaha untuk menjembatani antara dua kepentingan tersebut. Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam beberapa literatur yang menyebutkan bahwa diplomasi kemanusiaan dipahami sebagai sebuah upaya damai yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan utamanya terhadap komitmen yang didasarkan kepada prinsip - prinsip, nilai dan norma kemanusiaan yang universal.³⁹

³⁹ Sugiono, M., & Rosyidin, M. (n.d.). *Mengosiasikan yang tidak bisa dinegosiasikan ; menjembatani kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam konsep diplomasi kemanusiaan*, diakses tanggal 31 Juli 2019 dari situs www.researchgate.net.

Adapun tujuan diplomasi kemanusiaan adalah :

“ Humanitarian diplomacy aims to mobilise public and governmental support and resources for humanitarian operations and programmes, and to facilitate effective partnerships for responding to the needs of vulnerable people. Humanitarian diplomacy includes advocacy, negotiation, communication, formal agreements, and other measures. It is a field with many players, including governments, international organisations, NGOs, the private sector, and individuals”

40

Berdasarkan definisi dari tujuan diatas dapat dimaknai bahwasannya diplomasi kemanusiaan adalah jalan yang dapat ditempuh untuk menggalang dukungan dari pemerintah setiap negara untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Semua bentuk upaya tersebut tidak lain adalah sebagai bentuk tanggung jawab atas perlindungan bagi mereka yang terlantar melalui usaha advokasi, negosiasi, komunikasi atau perjanjian.

Dalam konteks ini, Indonesia juga memiliki posisi yang tegas sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dan berkedaulatan. Bila dikaitkan dengan isu diplomasi, maka Indonesia mempunyai dua prioritas yaitu diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan. Kedua diplomasi ini memiliki keterkaitan erat dan saling mempengaruhi.⁴¹

⁴⁰ Kelly-Kate Pease, “Human Rights and Humanitarian Diplomacy : Negotiating for Human Rights Protection and Humanitarian Access”, (Manchester : Manchester University Press)

⁴¹ <https://www.antaraneews.com>, *Diplomasi Kemanusiaan-Perdamaian Prioritas Kebijakan Luar Negeri*, diakses tanggal 26 Juli 2019 dari situs <https://www.antaraneews.com/berita/779401/diplomasi-kemanusiaan-perdamaian-prioritas-kebijakan-luar-negeri>

Dua diplomasi tersebut dilakukan sebagai bagian dari amanat konstitusi Indonesia. Selain itu juga sebagai instrumen politik luar negeri Indonesia guna mewujudkan dukungan dan kepemimpinan Indonesia dimata global sebagai upaya pencegahan atau penanganan krisis kemanusiaan yang melanda dunia, sekaligus mewujudkan keamanan dan perdamaian dunia.

Bila kita telaah maka dapat kita lihat konsistensi Indonesia dalam melakukan upaya diplomasi kemanusiaan. Salah satunya adalah Indonesia berperan aktif dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis Palestina - Israel dan termasuk juga isu yang saat ini tengah hangat dibicarakan masyarakat internasional terkait upaya penyelamatan muslim Rohingya diberbagai negara.

Indonesia patut berbangga dalam hal ini karena upaya diplomasi kemanusiaan yang telah dilakukan selama ini membuahkan hasil dan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari dunia internasional. Hal ini terbukti dari dinobatkannya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020.

Terpilihnya Indonesia dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara. Dari 190 suara anggota PBB, Indonesia memperoleh suara prioritas sebanyak 144 suara. Hasil ini tentu saja membanggakan Indonesia sekaligus menjadi motivasi besar untuk terus melakukan diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan secara konsisten sebagaimana amanat Konsititusi Indonesia.

Sehingga tak diragukan lagi bahwa Indonesia untuk masa mendatang akan tetap konsisten mengupayakan agar diplomasi perdamaian dan diplomasi kemanusiaan tetap menjadi agenda prioritas dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia. Karena tanpa terciptanya perdamaian dunia maka dapat dipastikan tragedi-tragedi kemanusiaan akan mudah timbul.

Tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia begitu konsisten dengan diplomasi kemanusiaan dan perdamaian yang diusung dan hal ini terlihat dari sikap-sikap yang ditunjukkan sebagai bagian dari politik luar negeri Indonesia. Terkait dengan hal ini maka untuk mewujudkan dan menunjang eksistensinya, ada empat prioritas Politik Luar Negeri Indonesia diantaranya; Menjaga Kedaulatan NKRI, Perlindungan WNI di Luar Negeri, Diplomasi Ekonomi dan Meningkatkan Peran Indonesia di Kawasan dan Dunia Internasional.⁴²

Selain itu ada tiga hal yang menjadi sorotan utama dalam diplomasi dan politik luar negeri RI diantaranya; krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, bantuan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan palestina dan ketiga diplomasi perlindungan warga Indonesia yang berada di luar negeri.⁴³ Dan saat ini salah satu agenda mendesak adalah krisis kemanusiaan di Rakhine sebagai bagian dari upaya diplomasi pemerintah Republik Indonesia.

⁴² <http://kemlu.go.id> ,

⁴³ <http://kemlu.go.id> , Tiga Sorotan Utama Diplomasi dan Politik Luar Negeri, diakses tanggal 02 Agustus 2019 dari situs <http://kemlu.go.id>

Terkait dengan upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia di Myanmar, pemerintah Indonesia melalui kementerian luar negeri bertemu dengan Panglima Bersenjata Myanmar Jenderal *Tathmadaw U Ming Aung Hlaing* dan mendesak militer Myanmar agar menghentikan kekerasan di Rakhine. Sedangkan, ketika bertemu dengan *State Counsellor Daw Aung Saan Suu Kyi*, sebagai pemimpin *de facto* Myanmar. Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan proposal formula 4+1 untuk penyelesaian krisis untuk Rakhine, yang mana: 4 elemen utama tersebut yaitu:⁴⁴

1. Mengembalikan stabilitas dan keamanan.
2. Menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan.
3. Perlindungan terhadap semua orang yang berada di Rakhine state tanpa memandang suku dan agama.
4. Pentingnya agar segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.

Berikut dapat kita lihat beberapa bantuan kemanusiaan yang sudah diberikan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya diplomasi kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya :

⁴⁴ *Ibid*

Tabel 2
Upaya Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia
Bagi Rohingya

Bentuk Bantuan	Uraian
Pembentukan kerja sama dengan Pemerintah Myanmar terkait upaya resolusi konflik di Rakhine	kerja sama dengan Myanmar diwujudkan dalam bentuk proses rekonsiliasi, demokratisasi, dan pembangunan inklusif, termasuk upaya implementasi rekomendasi laporan Kofi Annan.
Penunjukkan Menteri Luar Negeri Indonesia menjalin komunikasi interaktif dengan berbagai pihak	Pemerintah secara tegas menugaskan Menteri Luar Negeri (Menlu) menjalin komunikasi intensif dengan berbagai aktor, termasuk Sekretaris Jenderal PBB dan Komisi Penasehat khusus untuk Rakhine State Koffi Annan
Pembentukan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM)	Merupakan aliansi yang dibentuk oleh masyarakat Indonesia atas kasus kemanusiaan yang terjadi di Rakhine. Aliansi ini dibentuk dalam rangka untuk mencegah bencana. Salah satu programnya adalah pembentukan Program <i>Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO)</i>

	dengan komitmen bantuan USD 2 Juta.
Pembentukan program <i>Humanitarian Assistance for Sustainable Community (HASCO)</i>	Program ini merupakan agenda Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM) Untuk Myanmar yang bertujuan membantu masyarakat Myanmar, khususnya di Rakhine State. Program ini diluncurkan oleh Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2017. Bantuan yang diberikan diantaranya berupa peningkatan kapasitas, pengiriman tenaga ahli,, <i>livelihood</i> , dan pemulihan.
Upaya mendorong agar terwujud menjadi anggota tidak tetap <i>United Nations Security Council (UNSC)</i>	Pemerintah Indonesia dengan segenap upaya mendorong agar dapat terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB). Hal ini dilakukan agar Indonesia dapat melakukan tindakan yang optimal bagi penciptaan perdamaian dunia.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bentuk upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dibantu oleh Kementerian Luar Negeri berfokus pada upaya untuk mendorong berakhirnya kekerasan bernuansa etnis di Myanmar.

Pengaruh Bantuan Kemanusiaan dan Upaya Diplomasi Indonesia

Tak dapat diabaikan bahwasannya konflik kekerasan yang terjadi di Myanmar merupakan kekerasan yang cukup menyedihkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan terutama pada era global saat ini. Diketahui bahwa Saat ini Muslim Rohingya yang masih berada di Rakhine hidup terisolasi dalam ketakutan. Sejauh ini jumlah populasi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine semakin menurun drastis hingga menjadi 40% dibanding tahun sebelumnya. Populasi Rohingya menurut UNHCR ialah 1,3 juta orang, dimana 926.000 adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan 375.000 lainnya menjadi pengungsi di negara mereka sendiri. Sejak tahun 2013 lalu, ribuan warga melarikan diri ke negara-negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand melalui jalur laut.⁴⁵

Sehingga dapat dikatakan bahwa Konflik yang terjadi di Myanmar saat ini mendapatkan sorotan dunia internasional serta menggugah nilai-nilai kemanusiaan dan hati nurani untuk turut berkontribusi pada penyelesaiannya. Begitu juga dengan Indonesia selaku negara pendukung perdamaian turut

⁴⁵ <https://act.id/rohingya/>, Tentang Rohingya, diakses tanggal 22 Oktober 2019 dari situs <https://act.id/rohingya/>

memberikan kontribusi yang diharapkan dapat mendorong pada upaya mengakhiri konflik yang tengah terjadi.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasannya Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia merupakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif yang berfokus pada upaya menciptakan perdamaian dunia. Oleh karena itu Indonesia begitu aktif bahkan dapat menjadi garda terdepan di tingkat ASEAN dalam konflik Rakhine.

K.J. Holsti mendefinisikan Politik Luar Negeri sebagai *“as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated”*.⁴⁶ Hal ini berarti bahwa politik luar negeri merupakan kebijakan yang dipengaruhi oleh faktor internal sebelum sebuah politik atau kebijakan diambil. Kebijakan ini secara tidak langsung juga menjadi komitmen suatu negara dalam konteks hubungannya dilingkungan eksternal.

Dalam konteks kekerasan terhadap Rohingya ini, langkah yang diambil oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh berbagai faktor. Bila kita lihat lebih jauh ada 2 faktor utama yang mendorong Indonesia melakukan upaya perdamaian bagi Rohingya yang menjadi arah dari Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia yaitu Faktor faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yang menjadi landasan utama Diplomasi Indonesia ditingkat internasional dalam kasus kekerasan

⁴⁶ K.J. Holsti. 1970. *“National Role Conceptions in the study of Foreign policy”*. Vol. 14, No. 3.

Rohingya ini adalah sebagaimana yang tercantum didalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “.....ikut serta mewujudkan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Berangkat dari amanah inilah Indonesia menempatkan upaya perdamaian dunia sebagai salah satu agenda penting dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia sekaligus sebagai wujud jatidiri bangsa.

Faktor lain yang juga merupakan alasan internal yaitu beranjak dari perasaan senasib dan sepenanggungan yang juga pernah dirasakan oleh Indonesia saat masih berada pada era penjajahan kolonial selama ratusan tahun. Sehingga bangsa Indonesia sangat memahami arti dari kemerdekaan dan bebas dari segala bentuk penindasan. Hal ini sesuai sebagaimana amanah yang tercantum dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “*Bahwa Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan*”.

Faktor lainnya yang turut menyumbang bagi landasan kebijakan Indonesia bagi kelompok Rohingya yaitu adanya faktor sesama muslim yang menjadi keyakinan mayoritas masyarakat Indonesia. Meskipun terdengar sangat klise, namun tak pelak dorongan dari kelompok muslim Indonesia menuntut agar Pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dan menempatkan diri sebagai pihak yang mendukung penghentian kekerasan bagi minoritas Rohingya di Myanmar.

Sedangkan bila melihat pada faktor eksternal salah satu pertimbangannya adalah pentingnya membangun kepercayaan

internasional sekaligus menegaskan kembali keberpihakan Indonesia pada kasus muslim Rohingya ini. Karena tak dapat dipungkiri bahwa dukungan negara lain bagi suatu negara akan menentukan pola interaksi yang akan berlangsung bagi masa mendatang. Secara tidak langsung, bahwa adanya tekanan internasional juga akan mempengaruhi arah kebijakan politik suatu negara.

Bila kita menilik lagi pada konteks ini secara lebih mendalam, maka dapat kita katakan bahwa bantuan kemanusiaan yang dilakukan masyarakat aceh bagii pengungsi Rohingya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwasannya pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik ditingkat regional maupun global dalam rangka mengakhiri konflik Rakhine ini.

Berita baik bagi Indonesia tepatnya pada 1 Januari 2019, Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk masa dua tahun mendatang sampai dengan 31 Desember 2020. Empat negara lain yang juga bergabung dengan Indonesia yaitu Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika dan Jerman. Menjadi Anggota Tidak Tetap DK PBB bukanlah hal baru baru Indonesia. Sebelumnya Indonesia pernah menduduki posisi ini pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.⁴⁷

⁴⁷ <https://www.voaindonesia.com>, Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, diakses tanggal 23 Oktober 2019 dari situs <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html>

Pada pemilihan Juni 2018 lalu, Indonesia mendapat dukungan 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Terpilihnya Indonesia maka akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional sesuai mandat Piagam PBB. merujuk pada situs PBB, www.un.org Indonesia juga akan menjabat posisi Presiden Dewan Keamanan PBB pada bulan Mei 2019.⁴⁸

Menjadi menarik untuk dipahami bersama bahwasannya terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap dewan Keamanan PBB merupakan bukti dari besarnya dukungan internasional yang merupakan bentuk kepercayaan masyarakat internasional terhadap rekam jejak diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang signifikan dalam menjaga perdamaian dunia. Sehingga, momentum ini menjadi sangat krusial bagi Indonesia karena sekaligus memberikan 'kemudi' bagi Indonesia untuk menjalankan diplomasi kemanusiaan dan kebijakan politik luar negeri lainnya dibidang perdamaian.

Oleh karena itu dapat dijelaskan lebih lanjut bahwasannya bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh terhadap pengungsi Rohingya telah sejalan dengan upaya diplomasi kemanusiaan Indonesia. Bahkan, tindakan ini bagian dari upaya untuk menunjang kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ditingkat kawasan dan juga global.

Perlu ditegaskan kembali bahwa diplomasi kemanusiaan merupakan salah satu agenda yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana telah diatur di dalam

⁴⁸ *Ibid*

konstitusi nasional. Bahwa dalam mengatasi isu kemanusiaan yang bersifat multi-dimensional, diplomasi track 1.5 diperlukan keikutsertaan -semua elemen bangsa demi memperoleh skema kerjasama dan solusi yang tepat. Sehingga dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa bantuan kemanusiaan masyarakat Aceh ikut menunjang agenda penting pemerintah Indonesia.

Dapat kita pahami bahwa agenda penting pemerintah dibidang diplomasi kemanusiaan ini tetap akan berjalan andaikata sekalipun masyarakat Aceh tidak memberikan bantuan kepada pengungsi Rohingya tersebut. Namun, di titik inilah kebijakan dan upaya diplomasi pemerintah Indonesia menjadi begitu signifikan dan krusial mengingat peran penting segala elemen bangsa dibutuhkan. Dengan kata lain dapat kita katakan bahwa kontribusi dari masyarakat Aceh dalam konteks ini memperkuat dan mendukung upaya Diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia.

Dalam kegiatan Regional Conference on Humanitarian Assistance di Jakarta pada 8 Agustus 2019 yang diikuti oleh 17 negara di lawasan, 5 organisasi internasional dan 17 lembaga swadaya masyarakat di bidang kemanusiaan, Indonesia memprakarsai untuk mendorong penguatan kemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang menjadikan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan sebagai salah satu prioritasnya.⁴⁹

⁴⁹ <https://kemlu.go.id>, Regional Conference on Humanitarian Assistance, Upaya Kongkrit Kepemimpinan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Kawasan, diakses tanggal 23 Oktober 2019 dari situs

Terdapat lima isu utama yang telah dibahas oleh para peserta konferensi tersebut, yakni mengenai (i) Pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal; (ii) Kerja sama dan kolaborasi *multi-sectoral* dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan; (iii) Pelibatan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan orang tua; (iv) Aspek keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan, yang mendukung transisi dari fase tanggap darurat ke fase pembangunan; serta (v) Perlindungan aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan.⁵⁰

Bila meninjau pada lima isu strategis pada kegiatan tersebut dapat kita katakan bahwa masyarakat Aceh dan kontribusinya bagi pengungsi Rohingya ini sebagai aktor kemanusiaan ditingkat lokal dan nasional. Sehingga secara tidak langsung telah mendukung keberlanjutan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan pada poin berikutnya. Selain itu juga dapat dimaknai bahwa aktor kemanusiaan dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan ini berhak atas perlindungan.

Sebagaimana yang diketahui bersama bahwasannya aktor kemanusiaan dewasa ini tidak hanya dapat dilakukan oleh negara atau organisasi internasional saja, namun dalam beberapa kasus peran masyarakat internasional atau

<https://kemlu.go.id/portal/id/read/511/berita/regional-conference-on-humanitarian-assistance-upaya-kongkrit-kepemimpinan-diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-kawasan>

⁵⁰ *Ibid*

perseorangan menjadi signifikan. Sama halnya dengan bantuan masyarakat Aceh bagi pengungsi Rohingya yang berpengaruh bagi penyelenggaraan dan keberlangsungan diplomasi kemanusiaan Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya turut mempengaruhi upaya diplomasi kemanusiaan pemerintah Indonesia. Peran masyarakat Aceh yang dalam konteks ini dapat dikatakan sebagai aktor kemanusiaan turut memperkuat sekaligus menegaskan posisi kepemimpinan Indonesia ditingkat kawasan dan global sebagai pendukung perdamaian dunia. Sehingga secara tidak langsung masyarakat Aceh juga menempatkan dirinya sebagai *peace supporter* yang siap menyokong kebijakan politik luar negeri Indonesia dan yang mengedepankan diplomasi kemanusiaan sebagai langkah strategis menciptakan perdamaian dunia.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Kebijakan politik luar negeri suatu negara dapat dikatakan juga merupakan cerminan dari prinsip-prinsip dasar sebuah negara yang memuat langkah-langkah strategis di tingkat global. Dalam konteks ini Indonesia mengedepankan politik luar negeri yang berfokus pada diplomasi kemanusiaan sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian dunia sebagaimana juga yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian dunia, Indonesia gencar melakukan diplomasi kemanusiaan terutama pada kasus kekerasan terhadap muslim Rohingya di Rakhine Myanmar. Indonesia juga memprakarsai untuk mendorong penguatan kemajuan kepemimpinan diplomasi kemanusiaan Indonesia di tingkat kawasan dan global. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan Pemberdayaan aktor kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal. Selain itu juga membangun Kerja sama dan kolaborasi *multi-sectoral* dalam penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya memberikan pengaruh bagi perjalanan dan rekam jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan ditingkat global. Hal ini lantas menjadi menarik mengingat latar belakang bantuan kemanusiaan dari masyarakat Aceh kepada pengungsi Rohingya sama sekali tidak didasari atau diniatkan untuk mendongkrak upaya upaya diplomai Pemerintah. Namun, ternyata tindakan

yang dapat dikatakan heroik ini berimplikasi penting bagi arah kebijakan pemerintah dalam upaya diplomasi kemanusiaan terhadap Myanmar terutama Rohingya. Kontribusi masyarakat Aceh dalam hal ini memberikan penguatan dan mempertegas posisi Indonesia sebagai *leader* bagi upaya perdamaian dunia melalui Diplomasi kemanusiaan. Dan masyarakat aceh dapat ditempatkan sebagai aktor kemanusiaan (*humanitarian actor*) yang menyokong penuh upaya pemerintah Indonesia bagi langkah-langkah strategis dalam diplomasi kemanusiaan.

Saran

Bagi pengambil kebijakan ditingkat Global dan nasional perlu memaksimalkan peran masyarakat dalam langkah-langkah strategis di ranah kemanusiaan sehingga koordinasi yang sinergis bagi upaya diplomasi kemanusiaan dan perdamaian dunia. Bagi peneliti lain yang ingin mengkaji tema yang serupa dapat mengkaji isu-isu krusial lain dalam aspek kemanusiaan seperti hak asasi manusia, kemiskinan, isu lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Peran masyarakat secara khusus baik personal maupun organisasi perlu ditingkatkan sebagai wujud responsif dukungan bagi pemerintah Indonesia dalam upaya diplomasi kemanusiaan sesuai dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ambarwati, Denny R dan Rina Rusman (eds). (2010). *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali
- Azwar, Saifuddin. (1998). *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset.
- ICRC. (2005). *Kenali ICRC*". Jenewa
- Kelly-Kate Pease, "Human Rights and Humanitarian Diplomacy : Negotiating for Human Rights Protection and Humanitarian Access", (Manchester : Manchester University Press)
- Leedy, Paul D. (1997). *Practical Research, Planning and Design*, New Jersey : Prentice Hall,inc.
- Miner, Larry dan Hazel Smith.(2007). *Humanitarian Diplomacy : Practitioner and their Craft*, Tokyo:United Nations University.
- Nazir, Muhammad. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghafia Indonesia
- Pease, Kelly-Kate . (2016). *Human Rights and Humanitarian Diplomacy : Negotiating for Human Rights Protection and Humanitarian Access*. Manchester : Manchester University Press
- Report of ICSS (International Commission on Intervention and State Sovereignty). (2001). *Responsibility to Protect*. Canada :International Development Research Centre.

Sugiono, (1999). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung :CV Alfabeta.

Jurnal

K J. Holsti. 1970. "National Role Conceptions in the study of Foreign policy". Vol. 14, No. 3

Ludfiani, Anifa , Abubakar Eby Hara, dan Bagus Sigit Sunarko"Krisis Kemanusiaan dan Upaya Thailand Mengatasi Gelombang Pengungsi Rohingya. (2017)" *Jurnal E-SOSPOL* Volume IV Edisi 2, Mei - Agustus

Marelda, Santa. (2011). "Responsibility to Protect: Suatu Tanggung Jawab dalam Kedaulatan Negara". *Jurnal Hubungan Internasional* .Vol 2. No.1

Ula, Syarifatul.(2017). "Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional: Studi Kasus Human Rights Watch dalam Krisis Kemanusiaan di Myanmar" *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 3

Yumitro, Gonda . (2017). "Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya". *Jurnal Sospol* Vol 3 No 2 Juli-Desember

Sugiono, M., & Rosyidin, M. (n.d.). *Mengosiasikan yang tidak bisa dinegosiasikan ; menjembatani kepentingan Nasional dan Kepentingan Internasional dalam konsep diplomasi kemanusiaan*, diakses tanggal 31 Juli 2019 dari situs www.researchgate.net.

Online

Srikandi , Annisa Gita ., *Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Myanmar* , diakses pada tanggal 8 September 2018, melalui situs dalam <http://hi.fisipol.ugm.ac.id/riset-iis/diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-myanmar/>

Humanitarian Diplomacy Policy, diakses tanggal 12 September 2018 dari situs <https://media.ifrc.org/ifrc/>

<https://beritagar.id> , *Aceh Tampung Sementara Puluhan Pengungsi Rohingya*, diakses tanggal 23 Juli 2019 dari situs www.Beritagar.id

<https://radartegal.com>, *Pengungsi Rohingya masih butuh bantuan*, diakses tanggal 23 Juli 2019 dari situs <https://radartegal.com/berita-nasional/pengungsi-rohingya-masih-butuh-bantuan.30158.html>

<https://dunia.tempo.co>, *Alasan Malaysia Ogah Bantu Pengungsi Rohingya*, diakses tanggal 24 Juli 2019 dari situs <https://dunia.tempo.co/read/666972/alasan-malaysia-ogah-bantu-pengungsi-rohingya/full&view=ok>

<https://www.liputan6.com>, *Thailand-Malaysia Menolak, Pengungsi Rohingya terdampar di Aceh*, diakses tanggal 24 Juli 2019 dari situs <https://www.liputan6.com/global/read/2232748/thailand-malaysia-menolak-pengungsi-rohingya-terdampar-di-aceh?>

<http://jrs.or.id/refugee/>, *Pengungsi*, diakses tanggal 25 Juli 2019 dari situs <http://jrs.or.id/refugee/>

<https://www.antaranews.com>, *Diplomasi Kemanusiaan-Perdamaian Prioritas Kebijakan Luar Negeri*, diakses tanggal 26 Juli 2019 dari situs <https://www.antaranews.com/berita/779401/diplomasi-kemanusiaan-perdamaian-prioritas-kebijakan-luar-negeri>

<https://www.republika.co.id>, *Melacak Asal Usul Etnis Rohingya*, diakses tanggal 05 Agustus 2019 dari situs <https://www.republika.co.id/berita/koran/islam-digest-koran/15/05/31/np7roj-melacak-asal-usul-etnis-rohingya>

<https://www.dw.com>, *Sejarah Kelam Muslim Rohingya*, diakses tanggal 06 Agustus 2019 dari situs <https://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421>

www.republika.co.id, *ACT Aceh Berikan Layanan Siap Santap ke Pengungsi Rohingya*, diakses tanggal 11 Oktober 2019 dari situs www.republika.co.id

<https://act.id/rohingya/>, *Tentang Rohingya*, diakses tanggal 22 Oktober 2019 dari situs <https://act.id/rohingya/>

<https://www.voaindonesia.com>, *Indonesia Resmi Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB*, diakses tanggal 23 Oktober 2019 dari situs <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-resmi-anggota-dewan-keamanan-pbb/4726303.html>

<https://kemlu.go.id>, *Regional Conference on Humanitarian Assistance, Upaya Kongkrit Kepemimpinan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Kawasan*, diakses tanggal 23 Oktober 2019 dari situs <https://kemlu.go.id/portal/id/read/511/berita/regional-conference-on-humanitarian-assistance-upaya-kongkrit-kepemimpinan-diplomasi-kemanusiaan-indonesia-di-kawasan>



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2019

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Mumtazinur, MA
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Asisten Ahli
4.	NIP	198609092014032002
5.	NIDN	2009098601
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200909860109019
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Lhokseumawe, 09 September 1986
8.	E-mail	mumtazinur@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	08126969347
10.	Alamat Kantor	Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Politik
13.	Program Studi	Hukum Tata Negara
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"	Universitas Gadjah Mada	-
2.	Kota dan Negara PT	Yogyakarta - Indonesia	Yogyakarta - Indonesia	-
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ilmu Hubungan Internasional	Ilmu Hubungan Internasional	-
4.	Tahun Lulus	2009	2011	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Peta Konflik Pilkada di Aceh Tahun 2017 (Studi Kasus Konflik Pilkada di Aceh Utara)	DIPA UIN Ar-Raniry

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.	2017	Pengabdian Berbasis Mesjid	DIPA UIN Ar-Raniry
2.	2019	Pengabdian Kepada Masyarakat “Penyuluhan Hukum Keluarga dan Kewarisan”	Prodi Hukum Keluarga

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Analisa Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Dalam Memberantas Terorisme Pada Masa Pemerintahan Presiden George W.Bush	Al-Ijtima’	Vol.1/ No.2 Maret 2015 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/JAI/index
2.	Globalisasi dan Keamanan Manusia (<i>Human Security</i>) : Kemiskinan di Indonesia	Dusturiyah	Vol.VI/No.1 Januari-Juni 2016 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur
3	Gender Dalam Perspektif Realisme Niccolo Machiavelli	Dusturiyah	Vol.VI/NO.2 Juli-Desember 2016 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/search
4	Peran Perempuan Dalam Proses Pemulihan Perdamaian di Burundi Melalui Penerapan Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB	Gender Equality	Vol.3/No.1Maret 2017 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/equality/search
5	Konflik Etnis Dayak dan Madura dalam Masalah Hutan Kalimantan : Perspektif <i>Green Thought</i>	Dusturiyah	Vol VII. No.2 Juli – Desember 2017 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur
6	Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Pelanggaran Hukum Humaniter Studi Kasus Pelanggaran HAM berat untuk Bekas Negara	Dusturiyah	Vol VIII. No 2. Juli-Desember 2018 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur

	Yugoslavia		
7	Potensi dan Peta Konflik Pilkada Aceh Tahun 2017	Dusturiyah	Vol.IX No.2 Juli – Desember 2019 http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/dustur

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Kesenian Aceh dan Rekonsiliasi Paskakonflik	2018	89 Hal	LKKI
2.	Buku Ajar Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar	2019	95 Hal	LKKI

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	-	-	-	-

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 30 Oktober 2019
Ketua/Anggota Peneliti,

Mumtazinur,MA
NIDN. 2009098601